

BAB II

**PASAR BEBAS ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE
AGREEMENT)**

A. Kondisi Umum Perdagangan Bebas Dunia.

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua(PD II) untuk mempertahankan kedudukannya Amerika Serikat mengambil satu kebijakan memelopori pengawasan moneter internasional melalui pertemuan di Inggris. Selain itu Amerika Serikat mengadakan pertemuan GATT(*General Agreement on Tarif and Trade*) yang dihadiri oleh 23 negara pada tahun 1947 yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu sistem perdagangan liberal yang bebas dari peraturan-peraturan tarif maupun non tarif.

Disamping GATT masih terdapat pertemuan-pertemuan lainnya seperti Annency(1949), Putaran Torquay(1950-1951), Putaran Jenewa(1955-1956), Putaran Dillon(1960-1961), Putaran Kennedy (1964-1967), Putaran Tokyo(1973-1979), Putaran Uruguay(1986-1994). Pada putaran Uruguay ini tercipta perubahan tata ekonomi internasional, karena dalam pertemuan ini dibahas penciptaan masalah sistem perdagangan dunia yang lebih bebas dan terbuka terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan GATT, juga dibahas masalah tarif perdagangan dan adanya berbagai

bentuk proteksionisme yang berasal dari negara-negara berkembang yang dapat menghambat perdagangan bebas yang diharapkan oleh negara-negara maju.

Perkembangan Hubungan Internasional pasca Perang Dingin menunjukkan beberapa pergeseran yang cukup menadasar. Pertama, dalam struktur hubungan internasional terjadi pergeseran dari bipolarisasi menuju struktur hubungan baru yang cenderung multipolar. Kedua, terjadi pergeseran isu pokok dalam hubungan internasional, dari isu persaingan ideologis yang didukung oleh kekuatan militer sebagai instrumen utama. Pasca Perang Dingin ini diwarnai dengan kekuatan perdagangan bebas. Negara yang menguasai isu sentral dalam hubungan internasional akan dapat menguasai pola struktur hubungan internasional. Awal pergeseran isu tersebut tidak terlepas dari pergeseran prioritas Politik Luar Negeri Amerika Serikat(AS) pasca Perang Dingin.

Pemerintah Amerika Serikat dalam menggolkan program perdagangan bebas kesegala penjuru dunia, terutama ke wilayah sasaran utama Eropa dan Asia dilakukan melalui langkah-langkah strategis. Pertama, membantu mensukseskan ekonomi pasar terbuka, kemudian beranjak dari bantuan menuju perdagangan dan investasi. Politik perluasan yang dikembangkan Amerika Serikat sejak pemerintahan Clinton, dalam kapasitas tertentu makin terlihat wujud konkretnya. Menjelang akhir abad 20 dan menuju abad ke 21, sedikitnya pemerintah Amerika Serikat telah mempersiapkan pengaruhnya pada kerjasama ekonomi regional maupun global seperti pada AFTA, APEC dan NAFTA

Perkembangan suatu negara dewasa ini telah semakin terkait dengan perubahan yang terjadi dari negara lainnya. Interpedensi antar negara inilah yang telah menimbulkan proses globalisasi yang semakin kuat sehingga seakan-akan dunia telah menjadi satu. Pembukaan batas-batas perdagangan regional internasional mendorong terbentuknya, ACFTA, ANZFTA, AFTA, NAFTA, APEC, yang diharapkan berjalan secepatnya. Kemudian batas-batas negara ini akibat adanya kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang berlangsung pada akhir abad ke-20.

Dengan adanya pola hubungan antar bangsa yang semakin kompleks, maka perdagangan bebas tersebut akan membentuk suatu perubahan pada tata ekonomi dunia yang terdiri dari arus kapital, teknologi dan informasi yang telah mampu menerobos batas-batas negara bangsa. Globalisasi ekonomi dunia ini diwakili oleh kerjasama transnasional yang salah satu bentuknya adalah *Multinational Corporations(MNC's)*.

Perubahan – perubahan yang terjadi didunia diakibatkan dari suatu globalisasi yang melanda dunia. Salah satu globalisasi tersebut adalah globalisasi ekonomi. Proses globalisasi ekonomi yang melanda dunia ditandai oleh tiga proses penting. **Pertama**, adalah globalisasi produksi yang didorong oleh globalisasi investasi. **Kedua**, adalah globalisasi perdagangan yang semakin diperkuat oleh hasil kesepakatan putaran uruguay di maroko tahun 1994. **Ketiga**, adalah globalisasi

konsumsi.¹ Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi begitu pesat, sehingga konsumen dapat memperoleh informasi dari mana dan kapan saja.

Aspek liberalisasi menjadi semakin dominan dalam konteks globalisasi sehingga mungkin tidak akan terjadi apabila tidak adanya liberalisasi. Perkembangan tahapan liberalisasi ekonomi dan investasi ekonomi dan investasi dunia dewasa ini menunjukkan peningkatan yang semakin pesat. Prinsip liberalisasi perdagangan dan investasi dunia, sebagai mana dalam GATT(*General Agreement on Tariff and Trade*) pada april 1994.

Globalisasi bukanlah fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia sebelum kemunculan nation state perdagangan dan migrasi lintas negara benua telah sejak lama berlangsung. Jauh sebelumnya perdagangan regional telah mendapat interaksi antar suku bangsa terjadi. Sebelum memasuki abad ke-20 globalisasi dipandang sebagai gelombang masa depan. Meskipun globalisasi menjadi jaringan utama dalam hubungan internasional yang ditandai dengan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi yang berkembang ini sesuai dengan kekuatan pasar, dimana yang bermodal kuat dan menguasai informasi yang dapat mengembangkan isu-isu sentral dalam hubungan internasional maka akan dapat mengasai pasar.

Globalisasi bisa saja digenelalisir sebagai fenomena yang memiliki sisi bagi segala aspek kehidupan. Karena globalisasi banyak 'dihujat' jika ditinjau dari pendekatan struktur ekonomi politik internasional, yang terjadi sebenarnya tidaklah

¹ Boediono, *Ekonomi Internasional*(Bandun, CV. Bina Cipta. 1987) Hal. 16

global. Kenyataan yang terjadi adalah keseimbangan spasial sebagai mana ditunjukkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi didalam kawasan triad(Amerika Utara, Eropa Barat dan Asia Timur), sedangkan kawasan lainnya tetap saja terbelakang sejak 1980-an. Dewasa ini produksi, perdagangan, dan investasi global terpusat didalam dan diantara tiga kawasan besar tersebut, sementara kalangan menuluki sebagai globaltriad. *Globaltriad* ini pada tahun 1993 menguasai tiga perempat perdagangan dunia. Maka *global triad* ini yang mendominasi arus keuangan global, yang terjadi bukanlah globalisasi melainkan triadisasi. Namun pasar bebas tidak bisa dihindari oleh negara-negara lain, sebagai konsekuensi global kesepakatan pasar bebas menjadi hal penting dalam konsentrasi hubungan internasional saat ini.

Dengan diperlakukannya pasar bebas , otomatis persaingan terbuka secara bebas dan ketat. Ketangguhan ekonomi nasional sebagai usaha bersama dan konsolidasi ekonomi pemerintah harus menjadi modal utama untuk menghadapi perekonomian dunia. Peran pemerintah sangat dominan dalam memberikan kebijakan-kebijakan dalam membentuk peraturan yang dapat mengantisipasi semua kendala-kendala yang akan timbul pada saat pasar bebas itu telah berjalan.

Liberalisasi barang dan jasa serta modal membuat posisi pekerja dan serikat pekerja kian lemah. Dilain pihak tenaga kerja tidak terampil tak bebas berpindah ke negara-negara yang tingkat upah rata-ratanya lebih tinggi. Jadi liberalisasi yang terjadi lebih bersifat searah yang merugikan kepentingan negara-negara berkembang.

Setiap kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Suatu cara untuk mencapai kemakmuran tersebut adalah dengan melakukan perdagangan baik inter regional maupun internasional. Dengan sistem perdagangan bebas maka terbuka kemungkinan perkembangan ekonomi, perbaikan mutu barang, pekerjaan serta penggunaan faktor ekonomi ke arah yang lebih efisien. Selain itu dengan adanya perdagangan bebas maka semakin luas pula lintas perpindahan barang, yang mana tidak terikat dan tertuju pada suatu negara saja.

Perluasan dan lalulintas barang jasa dan informasi antar bangsa. Negara-negara yang sudah maju daya saingnya tidak dari faktor-faktor yang terdapat pada negara bangsanya. Yang menjadi tolak-ukur paling penting bagi bangsa yang memenangkan dalam hal perdagangan bebas adalah memiliki nilai hambatan tinggi.

Adapun kegiatan perdagangan dan investasi meliputi empat bidang yakni; kegiatan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi dan perlindungan terhadap hak cipta. Inti dari perjanjian ini adalah untuk menciptakan arus barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain bebas tanpa hambatan-hambatan tarif maupun non tarif serta tidak ada diskriminasi, baik antara penduduk maupun perusahaan lokal dengan penduduk maupun perusahaan asing serta negara dengan negara lain.

Sistem perdagangan dunia dibawah GATT ini diharapkan mampu memberikan perkembangan , kelancaran arus dan peningkatan volume perdagangan barang-barang dan jasa antar negara dapat terjamin, kesejahteraan masyarakat suatu negara tergantung pada hubungan perdagangan internasionalnya, sesuai dengan asumsi yang

diajukan oleh Triyana Yohanes” Apabila perdagangan internasional(impor-ekspor) meningkat baik, maka pendapatan rakyat khususnya dalam rangka penciptaan lapangan kerja”.

B. Stabilitas Ekonomi

Menurut Milton Friedman stabilitas ekonomi mengacu pada *a monetary and fiscal framework*.² Terpeliharanya stabilitas moneter adalah salah satu dimensi stabilitas nasional yang merupakan bagian integral dan sasaran pembangunan nasional. Stabilitas moneter yang mantap mempunyai pengaruh yang luas terhadap kegiatan perekonomian, termasuk di antaranya kegiatan di sektor perbankan. Indikator kebijakan moneter yakni suku bunga dan uang beredar. Akan tetapi, dalam keseharian perekonomian, hanya indikator suku bunga yang dapat di monitor secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu lazimnya, masyarakat juga dapat melihat dan merasakan beberapa hal penting yang menjadi indikator dari stabilitas moneter :

1. Laju inflasi pada tingkat yang cukup rendah
2. Suku bunga pada tingkat yang wajar
3. Nilai tukar rupiah yang realistis
4. Ekspektasi masyarakat terhadap moneter.³

² <http://www.fpiif.org/search?q=economic+stability> di akses tanggal 23 november 2011 pukul 20.20 wita

³ Wayan Sudirman, *kebijakan Fiskal dan Moneter : Teori dan Empirikal*, Kencana Prenada Group:Jakarta 2011

Keempat tolak ukur bisa dilihat sehari-hari dan dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat. Perkembangan beberapa tolak ukur stabilitas moneter tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan perkembangan kegiatan perbankan yang sehat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perkembangan ekonomi suatu negara mengalami pasang surut atau mengalami siklus yang pada periode tertentu tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh lambat. Untuk mengelolah perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau otoritas moneter melakukan langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro ini mengelolah sisi permintaan dan penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Kebijakan moneter diterapkan sejalan dengan siklus ekonomi, baik siklus ekonomi yang berkembang pesat atau *boom* atau saat siklus ekonomi yang melambat atau *depression* atau *slump*. Dengan demikian, dikenal ada dua kebijakan moneter yang ekspansif dan kontraktif.⁴ Kebijakan moneter yang ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, misalnya dilakukan dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar, Kebijakan moneter yang kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, misalnya dengan mengurangi uang yang beredar.⁵

⁴ Ibid

⁵ Ibid

Efektifitas kebijakan moneter tergantung pada hubungan antar uang beredar dan variable ekonomi utama seperti output dan inflasi. Perlu diteliti antara uang beredar, inflasi, dan output dalam jangka panjang. Mungkin dalam jangka panjang, kebijakan moneter hanya berdampak pada inflasi dan tidak ada pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Sebaliknya, dalam jangka pendek kebijakan moneter yang ekspansif dapat mendorong kegiatan ekonomi yang sedang mengalami resesi berkepanjangan.

Kebijakan moneter yang ditempuh otoritas moneter sangatlah beragam tergantung pada target akhir yang ingin dicapai sangatlah beragam pula. Di Indonesia, strategi kebijakan moneter juga dipengaruhi misalnya oleh kondisi kelembagaan pendukung efektivitas yang masih dalam taraf pengembangan, tingkat monetisasi perekonomian masih lebih rendah, tingkat penggunaan jasa perbankan yang relatif rendah.

Sebagaimana disebutkan bahwa kebijakan moneter dilakukan untuk mencapai target akhir tertentu yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan apabila didukung oleh adanya lembaga-lembaga dan sarana-sarana yang mendukung antara lain sistem keuangan termasuk sistem moneter didalamnya pasar uang antar bank, pasar modal, serta sistem pembayaran. Tanpa dukungan optimal dari sistem yang melingkupinya, kebijakan moneter tidak akan berjalan efektif.

Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi

yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.⁶ Kebijakan dengan mengubah-ubah kebijakan pajak atau kebijakan fiskal dilakukan karena adanya keinginan pemerintah untuk mengubah pendapatan pemerintah yang bersumber dari wajib pajak, yang nantinya digunakan untuk mengubah kemampuan pemerintah dalam mendanai programnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan rakyat.

Kebijakan fiskal mempengaruhi keseimbangan sektor barang dan jasa yang kemudian mempengaruhi barang dan jasa yang kemudian mempengaruhi sektor lainnya. Pengaruh ini dimulai dari keseimbangan pasar barang dan jasa atau sektor riil kemudian pada keseimbangan pasar uang dan akhirnya keseimbangan pasar luar negeri. Keseimbangan pasar barang dan jasa atau sektor riil adalah keseimbangan pendapatan pada perubahan tingkat bunga karena perubahan tabungan yang disebabkan oleh perubahan pajak yang kemudian berinteraksi dengan mempengaruhi investasi.⁷

Dalam perubahan pasar barang dan jasa tersebut karena pengaruh kebijakan fiskal, terlihat bahwa kebijakan fiskal memiliki tiga tujuan, yaitu:

1. Menjamin pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang potensial
2. Menciptakan tingkat harga umum yang stabil dan wajar

⁶ Ibid

⁷ Ibid

3. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa merintangai tujuan lain dari masyarakat.⁸

Dalam beberapa tahun terakhir, strategi kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dalam mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*), tetapi masih dapat memberikan ruang untuk stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Kebijakan fiskal secara umum adalah kearah ekspansif yang dicerminkan dari adanya kebijakan defisit, sehingga dapat memberikan andil dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.⁹

Kebijakan fiskal tahun 2009 tetap di arahkan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian domestik dengan besaran defisit yang berkesinambungan sesuai dengan batas kemampuan negara.¹⁰ Pada tahun 2010, kebijakan di sektor riil pada tahun sebelumnya dilanjutkan melalui pengucuran insentif fiskal.¹¹ Menurut Sry Mulyani, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menggenjot perekonomian di sektor riil pada tahun 2010 di harapkan dapat menjadi angin segar untuk perekonomian nasional. Pada tahun 2011 selain memberikan insentif fiskal kepda pengusaha berupa *tax holiday* bagi industri *pioneer*, pada tahun ini, pemerintah

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

juga member kemudahan untuk pengucuran kredit dari perbankan ke pengusaha, sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.¹²

Penjelasan mengenai kebijakan moneter dan fiskal dapat ditarik kesimpulan bahwa dua kebijakan ini sangatlah penting diantara seperangkat kebijakan ekonomi atau merupakan bagian integral dari seperangkat kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu, diakui pula bahwa dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter membawa pengaruh terhadap perubahan keseimbangan internal dan eksternal ekonomi suatu negara. Keseimbangan internal atau sering juga disebut dengan keseimbangan domestik

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.¹³ Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.¹⁴ Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
2. Pola persebaran sumber daya

¹² Ibid

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal di akses tanggal 29 januari 2012

¹⁴ Ibid

3. Distribusi pendapatan¹⁵

Kebijakan fiskal oleh pemerintah yang mencakup tentang pengaturan pengeluaran dan penerimaan APBN. Salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah untuk mempengaruhi penerimaan APBN yakni pengaturan terkait tarif pajak. Apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan tarif pajak untuk produk-produk ekspor dan impor, hal tersebut jelas akan mempengaruhi kondisi stabilitas perekonomian nasional utamanya industri yang berbasis pada ekspor seperti contoh industri tekstil dan alas kaki. Kedua industri tersebut merupakan industri yang banyak menghasilkan produk-produk unggulan untuk komoditi ekspor Indonesia.

Apabila pemerintah menaikkan tarif pajak untuk produk-produk ekspor maka dapat berpotensi mengurangi kapasitas produksi dan kemampuan daya saing produk-produk dari industri tekstil dan alas kaki. Dan bila dalam waktu yang bersamaan, pemerintah menerapkan kebijakan yang penurunan tarif bea masuk untuk produk-produk impor sesuai dengan perjanjian ACFTA maka kondisi tersebut jelas akan memberikan keuntungan bagi produk-produk impor dan potensi untuk mendominasi pasar domestik akan semakin besar.

Begitu pun sebaliknya, ketika pemerintah menurunkan tarif bea keluar untuk produk-produk ekspor maka jelas akan menjadi peluang besar bagi industri seperti industri tekstil dan alas kaki untuk memperbesar pangsa pasarnya. Hal tersebut dikarenakan, pelaku industri akan dapat menekan biaya produksi sehingga peluang untuk

¹⁵ Ibid

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dapat diperoleh. Akan tetapi, hal buruk dari kebijakan ini yakni, kebutuhan akan produk-produk tekstil dan alas kaki domestik kemungkinan tidak terpenuhi. Hal ini terjadi karena para produsen akan lebih memilih untuk memasarkan produknya keluar negeri bila dibandingkan dalam negeri dengan iming-iming keuntungan besar. Namun apabila kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi maka, kebijakan tersebut berhasil mengurangi impor tekstil dan alas kaki Indonesia dari China. Bilamana pemerintah menaikkan tarif bea masuk dari China maka hal tersebut jelas akan menekan masuknya produk impor dari China.